

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah Provinsi Jambi
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. R.M. Nur Atmadibrata No. 01 A Telp. (0741) 669352
Telanaipura Kode Pos 36124
JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Ranwal Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini memuat program kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dan Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 mendatang dengan mengakomodir kebutuhan riset yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota. Sehingga dengan demikian diharapkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* yang membutuhkan.

Demikian, semoga Ranwal Renja ini dapat memberikan dukungan terhadap Peran dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi serta dapat mendukung Visi, Misi Gubernur Jambi periode 2021-2026 ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”***. Terima kasih.

Jambi, Februari 2024

KEPALA BADAN,



Ir. H. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660722 199303 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyusunan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi	28
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	63
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	69
3.3. Program dan Kegiatan	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	90
BAB V PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Balitbangda Provinsi Jambi dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023.....	7
TABEL 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi	27
TABEL 2.3.	Review terhadap RKPD Tahun 2025	32
TABEL 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sebagai salah satu OPD dari Pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Renja 2025 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Renja Balitbangda 2025 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat, dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balitbangda Provinsi Jambi 2025 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026; dan
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja Balitbangda Provinsi Jambi untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2025 adalah untuk sebagai pedoman : 1. pelaksanaan pelayanan Perangkat; pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan; 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 pada dasarnya adalah pengukuran capaian dan evaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2023. Pada Tahun 2023, Balitbangda Provinsi Jambi melaksanakan 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d. Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Adapun rekapitulasi evaluasi capaian program/kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel. 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Balitbangda Provinsi Jambi dan Pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Balitbangda Tahun 2021- 2016	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Resntras Kinerja Progra dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s.d. Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP			BB Indeks	BB Indeks		BB Indeks	B Indeks	
I		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	100 %		100 % 100%	100	100%	100%	100%	100

1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Prov. Jambi	35 Dok	7 Dok	8 Dok	8 Dok	100	4 Dok	4 Dok	100
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	3 Dok	3 Dok	100
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	3 Dok	3 Dok	100
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40 Lap	8 Lap	7 Lap	7 Lap	100	8 Lap	8 Lap	100
II		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	100 %		100 %	100 %	100%	100%	100%	100
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Org/ Bln		50 Org/ Bln	50 Org/ Bln	100	44 Org/ Bln	44 Org/ Bln	100

III		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100 %		100 %	100 % 100	100%	100%	100%	100
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakrt Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	5 Paket	- Paket	- Paket	- Pake t		1 Paket	1 Paket	100
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegaaai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	5 Orang	12 Orang	12 Ora ng	100	10 Orang	10 Orang	100
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	100 %		100 %	100 % 100	100%	100%	100%	100
1		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Pake t	100	1 Paket	1 Paket	100
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		1 Paket	1 Pake t	100	2 Paket	2 Paket	100
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Pake t	100	1 Paket	1 Paket	100

4		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100	- Dok	- Dok	-
6		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	250 Kali	50 Kali	65 Lap	65 Lap	100	45 Lap	45 Lap	100
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100% 100	100%
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	- Unit	- Unit	- Unit		1 Unit	1 Unit	100
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	100 %		100 % 100%	100	100%	100%	100%	100
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Lap		12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100

2		Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan listrik	60 Lap		12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	12 Lap	100
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Lap		2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	2 Lap	100
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %		100 % 100%	100	100%	100%	100%	100
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	119 Unit	24 Unit	20 Unit	20 Unit	100	23 Unit	23 Unit	100
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	21 Unit		4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100

3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	30 Unit	37 Unit	37 Unit	100	30 Unit	30 100	100
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Pkt	1 Pkt						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	80%		60%	100 %	166,67%	65%	100%	153,85%
VII		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Daerah dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	80%		60%	100 %	166,67%	60%	100%	153,85%

1		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		5 Rek	1 Rek						
2		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100			
3		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100			
4		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100			
4		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	5 Lap	2 Lap				2 Lap	2 Lap	100

		Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan								
VII		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan yang perangkat daerah atau pihak lainnya pada bidang Sosial dan Kependudukan	80 %		60%	100 %	166,67%	65%	100%	153,85%
1		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5 Dok	1 Rek						
2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100			
3		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5 Dok					1 Dok	1 Dok	100

VIII		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
						60%	100 %	166,67%	65%	100%	153,85%
1		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5 Dok	2 Rek				1 Dok	1 Dok	100
2		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dok		2 Dok	2 Dok	100			
3		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 Dok	1 Rek	1 Dok	1 Dok	100			
4		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 Dok	1 Rek						

5		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	5 Dok		2 Dok	2 Dok	100			
IX		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan inovasi yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	80 %		60%	100 %	166,67%	65%	100%	153,85%
			Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	80%		60%	100 %	166,67%	65%	100%	153,85%
1		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Dok	1 Rek	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	100
2		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	25 Lap	4 Kali	5 Lap	5 Lap	100	5 Lap	5 Lap	100

3		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	15 Lap	3 Kali	3 Lap	3 Lap	100	2 Lap	2 Lap	100
4		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	15 Lap	6 Jenis	3 Lap	3 Lap	100	2 Lap	2 Lap	100
5		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 Lap	8 Dok	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	1 Lap	100

Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.

Realisasi program dan kegiatan Renja Tahun 2021 pada Tabel 2.1 ada yang tidak dapat terisi hal ini dikarenakan terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan, untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2019-2024 dan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Selama Tahun 2023 Balitbangda Provinsi Jambi dapat memenuhi seluruh target kinerja hasil/ keluaran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Berikut penjelasan mengenai tingkat pencapaian kinerja 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 262.915.506,- atau 98,49% dengan sisa anggaran Rp. 4.035.158,- (1,51%), meliputi sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penysusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyerapan belanja sebesar Rp. 183.832.268,- atau 99,77% dengan sisa anggaran Rp. 414.782,- (0,23%) dengan keluaran sub kegiatan 4 dokumen yang terdiri dari Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra Perubahan dan Laporan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Penyerapan belanja sebesar Rp. 8.877.171,- atau 96,18% dengan sisa anggaran Rp. 352.929,- (3,82%) dengan keluaran sub kegiatan 3 dokumen yang terdiri dari Dokumen RKA-SKPD Murni, Dokumen RKA-SKPD Perubahan, dan Laporan Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Penyerapan belanja sebesar Rp. 4.638.028,- atau 91,06% dengan sisa anggaran Rp. 455.472,- (8,94%) dengan keluaran sub kegiatan 3 dokumen yang terdiri dari Dokumen

DPA-SKPD Murni, Dokumen DPA-SKPD Perubahan, Laporan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD.

- Sub Kegiatan Koordinasi Penysusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyerapan belanja sebesar Rp. 4.638.028,- atau 91,06% dengan sisa anggaran Rp. 455.472,- (8,94%) dengan keluaran sub kegiatan Laporan yang terdiri dari Laporan Cascading, Executive Summary, Laporan Tahunan, LKj, LKPJ, LPPD, LPPK dan Laporan Evaluasi

2. Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 6.631.614.731,- atau 99,24% dengan sisa anggaran Rp. 50.764.289,- (0,76%), dengan keluaran sub kegiatan jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 44 orang/bulan selama 14 bulan. Banyaknya sisa anggaran, untuk mengantisipasi adanya mutasi pegawai, kenaikan tunjangan fungsional, gaji berkala dan kenaikan pangkat.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 68.228.600,- atau 97,82% dengan sisa anggaran Rp. 1.521.400,- (2,18%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Penyerapan belanja sebesar Rp. 38.628.000,- atau 99,05% dengan sisa anggaran Rp. 372.000,- (0,95%), dengan keluaran sub kegiatan jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 1 paket.
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyerapan belanja sebesar Rp. 29.600.600,- atau 96,26% dengan sisa anggaran Rp. 1.149.400,- (3,74%), dengan keluaran sub kegiatan jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 10 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 529.910.180,- atau 99,92% dengan sisa anggaran Rp. 420.005,- (0,08%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyerapan belanja sebesar Rp. 10.851.550,- atau 100% dengan sisa anggaran Rp. 0,- (0%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyerapan belanja sebesar Rp. 145.706.372,- atau 99,84% dengan sisa anggaran Rp. 226.840,- (0,16%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 2 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyerapan belanja sebesar Rp. 26.138.600,- atau 99,33% dengan sisa anggaran Rp. 175.400,- (0,76%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, Penyerapan belanja sebesar Rp. 39.998.343,- atau 99,98% dengan sisa anggaran Rp. 8.657,- (0,02%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 paket.
- Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyerapan belanja sebesar Rp. 307.215.315,- atau 100% dengan sisa anggaran Rp. 0,- (0%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 45 laporan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 18.004.950,- atau 99,42% dengan sisa anggaran Rp. 105.321,- (0,58%), dengan keluaran sub kegiatan pembelian 1 unit HP Samsung.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 380.929.060,- atau 93,89% dengan sisa anggaran Rp. 24.786.525,- (6,11%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyerapan belanja sebesar Rp. 37.349.776,- atau 99,95% dengan sisa anggaran Rp. 19.824,- (0,05%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik. Penyerapan belanja sebesar Rp. 150.472.230,- atau 85,91% dengan sisa anggaran Rp. 24.673.700,- (14,09%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Masih banyaknya sisa anggaran, dikarenakan untuk mengantisipasi kekurangan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Desember.
- Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 193.107.054,- atau 99,95% dengan sisa anggaran Rp. 93.001,- (0,05%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 2 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 522.998.488,- atau 95,72% dengan sisa anggaran Rp. 23.390.312,- (4,28%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 389.116.528,- atau 95,31% dengan sisa anggaran Rp. 19.132.272,- (4,69%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 23 unit

kendaraan. Banyaknya sisa anggaran dikarenakan, masih dianggarkannya honor staf PPTK pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.840.000,- dan sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 524/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2003 tentang Penunjukkan Pemakai Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) Milik Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023, poin KEEMPAT dimana para pemakai kendaraan dapat diberikan biaya eksploitasi dan pemeliharaan setiap bulan Rp. 200.000,- sehingga untuk satu tahun sebesar Rp. 2.400.000,- sedangkan dalam DPA-SKPD sesuai dengan SSH dianggarkan sebesar Rp. 3.810.000,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 103.882.000,- atau 96,06% dengan sisa anggaran Rp. 4.258.000,- (3,94%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 4 unit kendaraan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 29.999.960,- atau 99,99% dengan sisa anggaran Rp. 40,- (0,01%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 30 unit, berupa pemeliharaan AC, Laptop, dan Komputer.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, rincian capaian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 310.206.358,- dengan realisasi sebesar Rp. 309.986.146,- (99,93%). Sub Kegiatan ini melaksanakan :
 - Seminar Alquran pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 319 Tahun 2022 tentang Penetapan Provinsi Jambi sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah

Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023. Seminar ini bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, serta untuk menyebarluaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

- Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
Dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 100.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.086.317,- (99,46%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Stakeholder. Sub kegiatan ini melaksanakan Penelitian dengan judul **“UPAYA PERCEPATAN PERUNURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI : ANALISIS DATA ADMINISTRATIF DAN STUDI KUALITATIF”**.
 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah anggaran sebesar Rp. 142.882.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.527.562,- (99,75%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Stakeholder, dengan judul **“ANALISIS KEBERLANJUTAN KINERJA UMKM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI”**.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 677.083.220,- dengan realisasi sebesar Rp. 673.136.376,- (99,42%). Meliputi Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 55.640.680,- atau 99,83% dengan sisa anggaran Rp. 96.820,- (0,17%), sub kegiatan ini melaksanakan Analisis Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jambi Tahun 2022.
- Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 206.711.946,- atau 99,63% dengan sisa anggaran Rp. 772.054,- (0,37%), sub kegiatan ini melaksanakan Lomba Inovasi Produk Daerah Provinsi Jambi.
- Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 198.319.886,- atau 99,55% dengan sisa anggaran Rp. 904.934,- (0,45%), sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan : Lomba Inovasi Daerah antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi; Keikutsertaan Provinsi Jambi dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang dilaksanakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI di Jakarta; Penandatanganan Komitmen antara Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 14 Maret 2023 tentang pembentukan HUB Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (HUB JIPP) Provinsi Jambi. Hub JIPP merupakan platform yang digunakan untuk pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan, sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan diadakannya Hub JIPP ini, Kementerian PANRB akan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP Daerah; dan Ikut serta

dalam Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi mengirimkan 5 Proposal Inovasi Pelayanan Publik antara lain : SIADIK (Sistem Administrasi Dinas Pendidikan) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; SUDUNG BELAJA (Belajar dimano bae), Kapan bae dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; POS PULIH (Pos Pengaduan Lingkungan Hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; SIDABAGJA (SISTEM INFORMASI DANA BAGI HASIL) dari BPKPD Provinsi Jambi; dan PROMAGEN (Produksi Mandiri Oksigen) dari RSUD Rd. Mattaheh Jambi.

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 138.558.367,- atau 98,72% dengan sisa anggaran Rp. 1.798.533,- (1,28%), sub kegiatan ini melaksanakan : Penerbitan Jurnal Khazanah Intelektual, Khazanah Intelektual terbit 3 Kali dalam 1 Tahun (April, Agustus, Desember) Khazanah Intelektual telah terdaftar pada portal Garuda- Ristekbrin, dan terindeks pada Sistem CrossRef sehingga semua artikel akan memperoleh Digital Object Identifier (DOI) number; dan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan, Fasilitasi diseminasi merupakan salah satu kegiatan pendukung kelitbangan pada Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Jumlah anggaran sebesar Rp. 74.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.905.497,- (99,50%).

Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

Balitbangda Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2023 dalam pelaksanaannya telah memenuhi target kinerja program/kegiatan sesuai apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Balitbang Provinsi Jambi dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah provinsi dibidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam perencanaan kegiatan berpedoman kepada Renstra Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2021-2026, berfokus kepada isu-isu strategis, menjadi faktor kunci dalam pencapaian target. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan senantiasa berfokus pada waktu pelaksanaan, sehingga semua kegiatan

yang telah direncanakan tepat waktu sebagaimana yang terdapat pada dokumen Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023.

Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra OPD

Tercapainya target dari semua program yang direncanakan, berimplikasi kepada tertibnya administrasi baik secara pelaporan maupun keuangan pada tahun kedua periode renstra, yaitu tahun 2023.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Guna mencapai sistim penganggaran yang baik tentunya dimulai dari perencanaan yang baik pula. Adapun yang perlu dillakukan agar tercapai sistem perencanaan yang lebih baik lagi perlu diambil beberapa langkah, antara lain :

1. Perlunya sistim perencanaan yang baik yang didukung oleh penganggaran yang mencukupi yang dapat mewujudkan terlaksananya program/kegiatan yang telah direncanakan.
2. Melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas yang disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga program/kegiatan pembangunan sesuai tupoksi OPD dapat terlaksana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Secara umum Balitbangda Provinsi Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Balitbada Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja.

Berdasarkan Tabel 2.2. di bawah ini, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB
2	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/ Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya			50%	60%	65%	70%	75%	80%	166,67 %	153,85 %	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Balitbangda Provinsi Jambi berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

1. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya jumlah dan kepakaran/kompetensi fungsional peneliti serta penempatan aparatur belum sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*.
- b. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
- c. Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah
- d. Masih terbatasnya jumlah hasil inovasi dan dukungan iptekin yang aplikatif guna mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan.

2. Faktor Pendorong

- a. Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) sebagai payung hukum pelaksanaan Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan inovasi.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah sudah mulai tumbuh dalam mendukung penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi
- c. Sumber daya alam yang mendukung, yang harus dicari teknologinya, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut dan dapat berdaya saing dengan produk yang sama
- d. Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja
- e. Kerjasama dengan lintas sektoral : Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, OPD.

- f. Banyaknya permasalahan yang perlu diteliti/dikaji untuk masukan kebijakan daerah maupun permasalahan di masyarakat

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi, maka peran Balitbangda Provinsi Jambi sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Keberadaan Balitbangda Provinsi Jambi, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah

2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek.

Keterbatasan SDM peneliti (baik kepakaran dan jumlah) Balitbangda Provinsi Jambi akan diatasi dengan mengembangkan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek. Sumber daya Iptek seperti lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta cukup banyak terdapat di Provinsi Jambi. Keberadaannya dapat dijadikan sebagai mitra dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek dan peningkatan kapabilitas Balitbangda Provinsi Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi merupakan salah satu PD dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari PD lain. Hubungan kerja antara Balitbangda Provinsi Jambi dengan PD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan penelitian dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan

Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral.

Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.
4. Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan predikat Nilai SAKIP Balitbangda Provinsi Jambi menjadi "BB".

Langkah strategis mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitian pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitian pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitian pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pengembangan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.

2.4. Review Rancangan RKPD

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 untuk Balitbangda Provinsi Jambi tetap mengacu pada 2 (dua) program sebagai berikut :

- a. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan terdiri dari :
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Mikik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 menetapkan prioritas pembangunan sebagaimana Tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 2.3. Review Terhadap RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1		3	4	5	6	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI		Nilai AKIP	69,95	14.592.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI		Nilai AKIP	69,95	14.592.000.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JAMBI	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	100%	730.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JAMBI	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	100%	730.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)	7	380.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)	7	380.000.000

Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dok)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	105.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	105.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	45.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	9.855.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	9.855.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	9.600.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	9.600.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	39	100.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	39	100.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	35.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	35.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	35.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	25.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	3	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	3	35.000.000

Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	25.000.000	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	25.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	190.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	190.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	25.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	25.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	25.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	90.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	90.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	292.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	292.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)	1	52.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)	1	52.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	180.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	180.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.050.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.050.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	225.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	225.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000
Penyediaan Barang dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	60.000.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	60.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	25.000.000
Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	55	480.000.000	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	55	480.000.000
Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	55.000.000	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	55.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	1	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	1	100.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	825.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	825.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)	5	125.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)	5	125.000.000
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)	0				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)	0	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	550.000.000
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	1	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	1	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	55.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	55.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	735.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	735.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	55.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	55.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	300.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	280.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	280.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	915.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	915.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	24	320.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	24	320.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	155.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	155.000.000
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	60.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	60.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	30	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	30	40.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	300.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	30	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	30	40.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Police Brief Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan Stakeholder	72%	8.170.070.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Police Brief Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan Stakeholder	72%	8.170.070.000
		Indeks Inovasi Daerah	60,25				Indeks Inovasi Daerah	60,25	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Police Brief Hasil Riset yang diaplikasikan Stakeholder pada Bidang Penyelenggara	72%	2.455.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Police Brief Hasil Riset yang diaplikasikan Stakeholder pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	72%	2.455.000.000

		an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					Pengkajian Peraturan		
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah (Artikel)	4				Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	4	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara an Otonomi Daerah (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	1	180.000.000

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)					Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Keuangan dan AsetDaerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan AsetDaerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Keuangan dan AsetDaerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan AsetDaerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	1	180.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	1	180.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	180.000.000
Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	8	65.000.000	Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	8	65.000.000

Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	180.000.000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	180.000.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang		Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)	5	50.000.000	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang		Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)	5	50.000.000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Sosial dan Kependudukan	75%	1.980.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Sosial dan Kependudukan	75%	1.980.000.000
		Jumlah Naskah Jurnal dan Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah (Artikel)	4				Jumlah Naskah Jurnal dan Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	4	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	75%	2.340.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Ekonomi	75%	2.340.000.000

		pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan					dan Pembangunan		
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah (Artikel)	4				Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	4	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah DokumenHasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah DokumenHasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan	1	180.000.000

		dan Informatika (Dokumen)					Informatika (Dokumen)		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	72%	1.395.070.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	72%	1.395.070.000
		Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah	82				Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah	82	
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	2				Jumlah Naskah Jurnal Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	2	
		Jumlah Dokumen yang didaftarkan HKI-nya	8				Jumlah Dokumen yang didaftarkan HKI-nya	8	

Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	254.500.000	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	254.500.000
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji dan Pene Rancang Bangun/Model Replikasi dan In di Bidang Inovasi Penerapan Tekn (Laporan)	5	416.570.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Ha Pelaksanaan Uji Co dan Penerap Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inve di Bidang Dif Inovasi d Penerapan Teknol (Laporan)	5	416.570.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	3	291.500.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	3	291.500.000

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Diseminasi Kelitbangan (Lap	3	280.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan (Laporan	3	280.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Lap	1	152.500.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan	1	152.500.000
J U M L A H				22.762.070.000	J U M L A H				22.762.070.000

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Balitbangda Provinsi Jambi setiap tahun menghimpun usulan program dan kegiatan litbang serta kajian dari masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD di lingkungan Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota untuk menjadi bahan dalam Sidang Majelis Kelitbangan yang akan menetapkan tema penelitian dan pengembangan tahun berikutnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- a. **Badan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia-Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berubah nama mejadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri Dengan. BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BSKDN dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Meskipun BPP Kemendagri sudah berganti nama menjadi BSKDN namun dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri baru disahkan maka program kerja BSKDN masih menggunakan program kerja nomenklatur BPP Kemendagri. Perubahan nomenklatur BSKDN tersebut akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perubahan tugas dan fungsi serta perubahan substansi dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja),

Renstra BPP Kemendagri RI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Renstra BPP Kemendagri RI Tahun 2020-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2020-2024. Penyusunan Rencana strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, BPP Kemendagri mempunyai tugas ***“Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”***.

Tugas yang diemban oleh BPP diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi tersusunnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, serta efektif dan efisien dalam penerapannya. Untuk itu, Visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan Visi Badan Litbang

Kementerian Dalam Negeri yakni “Menjadi Mitra Terpercaya dalam perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif dan Inovatif”. Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan Visi : “Kementerian dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintah dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

b. Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) awalnya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), namun dalam perjalanannya, pada 5 Mei 2021, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN.

Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN Pasal 3 BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA. Sementara dalam pasal 4, BRIN menyelenggarakan 14 fungsi, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitas riset dan inovasi pemanfaatan riset dan inovasi;
4. Pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
5. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
6. Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan BERKELANJUTAN;

7. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
9. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
10. Pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
11. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
12. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
13. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Mempertimbangkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat,

mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi : ***“Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang Andal, Professional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.***

Kemampuan invensi dan inovasi dimaksudkan untuk menghasilkan produk hasil riset yang dilaksanakan dan inovasi yang berpotensi, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai sebagai keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan).

Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah :

1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing.
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Balitbangda Provinsi jambi sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang, bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah Provinsi Jambi, Balitbangda Provinsi Jambi membantu Gubernur untuk mewujudkan ketiga misi pembangunan. Misi yang terkait dengan tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi adalah Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016, bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”***, misi yang terkait dengan Urusan penunjang Pemerintahan Provinsi Jambi dalam bidang Penelitian dan Pengembangan adalah pada Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Renstra Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kesatu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-governmant yang terintegras maka **Tujuan** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah maka ditetapkan Sasaran Strategis T₁S₁: Terwujudnya Transparasi dan Akuntabilitas

Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi; T₁S₂ : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah.

Pencapaian sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Blitbangda Provinsi Jambi 2021-2026. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 2 (dua) Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.762.070,-, yang terdiri dari program dan kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 14.592.000.000,-
2. Program Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 8.170.070,-.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Capatatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6				10
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI	Nilai AKIP		69,95	14.592.000.000			69,99	14.990.250.000
5.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	JAMBI	100%	730.000.000			100%	800.000.000
5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)		7	380.000.000	APBD		7	400.000.000
5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		2	50.000.000	APBD		2	60.000.000

5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)		2	50.000.000	APBD		2	60.000.000
5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2	50.000.000	APBD		2	60.000.000
5.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2	50.000.000	APBD		2	60.000.000
5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		8	105.000.000	APBD		8	110.000.000
5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	45.000.000	APBD		1	50.000.000
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	9.855.000.000			100%	10.085.000.000

5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		65	9.600.000.000	APBD		70	9.800.000.000
5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		39	100.000.000	APBD		41	105.000.000
5.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		3	35.000.000	APBD		3	40.000.000
5.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		3	35.000.000	APBD		3	40.000.000
5.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		2	25.000.000	APBD		2	30.000.000
5.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)		3	35.000.000	APBD		3	40.000.000
5.05.01.1.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		2	25.000.000	APBD		2	30.000.000

5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	190.000.000			100%	215.000.000
5.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		2	25.000.000	APBD		2	30.000.000
5.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		2	25.000.000	APBD		2	30.000.000
5.05.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		2	25.000.000	APBD		2	30.000.000
5.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	25.000.000	APBD		2	30.000.000
5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	90.000.000	APBD		2	95.000.000
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	292.000.000			100%	375.250.000
5.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)		1	52.000.000	APBD		1	55.250.000

5.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		2	30.000.000	APBD		2	35.000.000
5.05.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		2	30.000.000	APBD		2	35.000.000
5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		20	180.000.000	APBD		25	250.000.000
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.050.000.000			100%	1.125.000.000
5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	30.000.000	APBD		1	35.000.000
5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2	225.000.000	APBD		2	250.000.000
5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	30.000.000	APBD		1	35.000.000
5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	45.000.000	APBD		1	50.000.000

5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	60.000.000	APBD		2	65.000.000
5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	25.000.000	APBD		1	30.000.000
5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)		55	480.000.000	APBD		60	500.000.000
5.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		12	55.000.000	APBD		12	60.000.000
5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)		1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	825.000.000			100%	560.000.000
5.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)		5	125.000.000	APBD		2	400.000.000

		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)		0		APBD		1	
5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	550.000.000	APBD		0	0
5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		1	45.000.000	APBD		1	50.000.000
5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		24	55.000.000	APBD		28	60.000.000
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	735.000.000			100%	810.000.000
5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	55.000.000	APBD		12	60.000.000
5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	300.000.000	APBD		12	350.000.000

5.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		2	100.000.000	APBD		2	100.000.000
5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2	280.000.000	APBD		2	300.000.000
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	915.000.000			100%	1.020.000.000
5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		24	320.000.000	APBD		29	350.000.000
5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4	155.000.000	APBD		5	160.000.000
5.05.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		30	60.000.000	APBD		30	70.000.000
5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		30	40.000.000	APBD		30	45.000.000

5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		1	300.000.000	APBD		1	350.000.000
5.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		30	40.000.000	APBD		30	45.000.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>		72%	8.170.070.000			75%	9.255.070.000
		Indeks Inovasi Daerah		60,25				60,50	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		72%	2.455.000.000			75%	2.785.000.000
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah		4				4	

5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		8	65.000.000	APBD		8	70.000.000
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)		5	50.000.000	APBD		5	50.000.000
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Sosial dan Kependudukan		75%	1.980.000.000			80%	2.255.000.000
		Jumlah Naskah Jurnal dang Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah		4				4	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan		75%	2.340.000.000			80%	2.665.000.000
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah		4				4	
5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000

5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		1	180.000.000	APBD		1	205.000.000
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>		72%	1.395.070.000			75%	1.550.070.000
		Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah		82				89	
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah		2				2	

		Jumlah Dokumen yang didaftarkan HKI-nya		8				10	
5.05.02.1.04.01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		1	254.500.000	APBD		1	310.000.000
5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		5	416.570.000	APBD		5	450.000.000
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		3	291.500.000	APBD		3	300.070.000
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan (Laporan)		3	280.000.000	APBD		3	320.000.000

5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		1	152.500.000	APBD		1	170.000.000
	J U M L A H				22.762.070.000				24.245.320.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 telah disusun menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kelitbang dan inovasi daerah di masa mendatang.

Ranwal Renja Balitbangda Provinsi Jambi ini menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, implementasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Balitbangda Provinsi Jambi.

Keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota. Semoga Dokumen Ranwal Renja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar tercapai kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang lebih baik.

Jambi, Februari 2024

KEPALA BADAN,



Ir. H. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19660722 199303 2 004

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Balitbangda Provinsi Jambi

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.		V		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	V			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Jambi, Februari 2024

KEPALA BADAN,

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
6	23	7	16		6	23	7	16	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI		Nilai AKIP	69,95	14.592.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI		Nilai AKIP	69,95	14.592.000.000
Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JAMBI	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	100%	730.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JAMBI	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	100%	730.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)	7	380.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)	7	380.000.000
Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokumen)	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	105.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	105.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	45.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	9.855.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	9.855.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	9.600.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	9.600.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	39	100.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	39	100.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	35.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	35.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	35.000.000
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	25.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	35.000.000
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	25.000.000	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	25.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada	100%	190.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada	100%	190.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	25.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	25.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	25.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	90.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	90.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi	100%	292.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi	100%	292.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)	1	52.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)	1	52.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	30.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	180.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	180.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.050.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.050.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	225.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	225.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	30.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	60.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	25.000.000
Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	55	480.000.000	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	55	480.000.000
Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	55.000.000	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	55.000.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	1	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	1	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	825.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	825.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)	5	125.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)	5	125.000.000
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)	0				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)	0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	550.000.000
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	45.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	1	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	1	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	55.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	55.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	735.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	735.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	55.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	55.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	300.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	280.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	280.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	915.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	915.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	24	320.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	24	320.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	155.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	155.000.000
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	60.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	60.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	30	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	30	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	300.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	30	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	30	40.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan	72%	8.170.070.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset dan Teknologi yang diaplikasikan	72%	8.170.070.000
		Indeks Inovasi Daerah	60,25				Indeks Inovasi Daerah	60,25	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	72%	2.455.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	72%	2.455.000.000

		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah (Artikel)	4				Jumlah Naskah Jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	4	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan desa		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	1	180.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	180.000.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	8	65.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	8	65.000.000
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	180.000.000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1	180.000.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1	180.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1	180.000.000
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang		Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)	5	50.000.000	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untyk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berwenang		Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi arga Negara Asing untuk diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang berenang (Rekomendasi)	5	50.000.000

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Sosial dan Kependudukan	75%	1.980.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada Bidang Sosial dan Kependudukan	75%	1.980.000.000
		Jumlah Naskah Jurnal dan Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah (Artikel)	4				Jumlah Naskah Jurnal dan Sosial dan Kependudukan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	4	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada	75%	2.340.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase <i>Police Brief</i> Hasil Riset yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> pada	75%	2.340.000.000
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan	4				Jumlah Naskah Jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dipublikasikan	4	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	180.000.000

Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan	1	180.000.000
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan	1	180.000.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan	1	180.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang	72%	1.395.070.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase <i>Police Brief</i> hasil Riset Pengembangan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang	72%	1.395.070.000
		Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi	82				Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi	82	
		Jumlah Naskah Jurnal Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	2				Jumlah Naskah Jurnal Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah	2	
		Jumlah Dokumen yang didaftarkan HKI-nya	8				Jumlah Dokumen yang didaftarkan HKI-nya	8	
Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	1	254.500.000	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	1	254.500.000

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5	416.570.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5	416.570.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	291.500.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	291.500.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil	3	280.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil	3	280.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan	1	152.500.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan	1	152.500.000
J U M L A H				22.762.070.000	J U M L A H				22.762.070.000